



RINGKASAN
RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2022**



RINGKASAN

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2022**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan periode ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

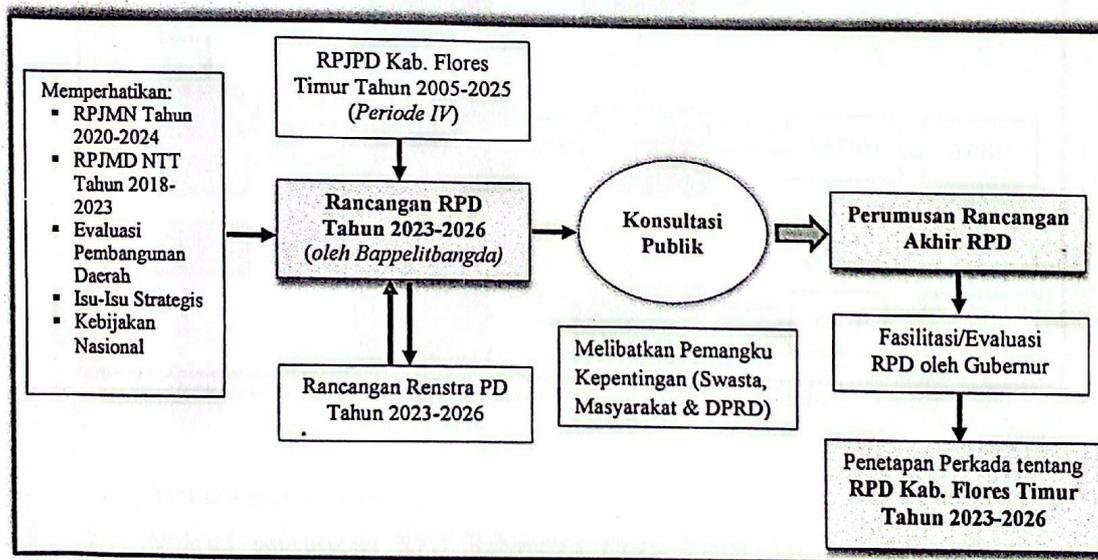
Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, RPD Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Flores

Timur Tahun 2005-2025 khususnya periode lima tahun keempat yaitu tahun 2021-2025. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Flores Timur di tahun berkenaan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kebijakan serta pembangunan yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan, penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku.

Proses penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan Teknokratik yakni pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan RPD senantiasa mengedepankan keterlibatan berbagai pihak (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya Daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu aktual yang dihadapi. Proses dan tahapan penyusunan RPD Tahun 2023-2026 secara diagram dapat dilihat pada gambar 1 berikut;

Gambar 1
Alur Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

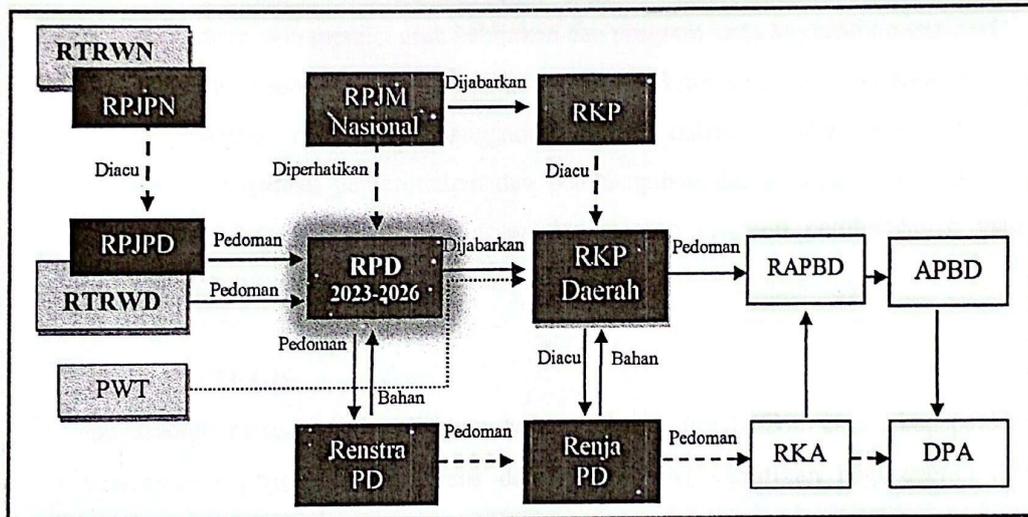
Rangkaian proses penyusunan RPD di atas menunjukkan bahwa RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, dan sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

b. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 senantiasa berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RPD Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterkaitan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 2 berikut;

Gambar 2. Hubungan antara RPD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

c. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuan penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.

- 2) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 3) Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarannya;
- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi NTT;
- 5) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
- 6) Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- 7) Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.
- 8) Menjadi pedoman lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar, dan sebaliknya suatu kondisi/peluang yang apabila dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Isu strategis Kabupaten Flores Timur dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, yang sinergi dengan isu global, nasional dan daerah sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, isu strategis kabupaten Flores Timur adalah:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (dalam arti luas) berbasis kawasan sesuai potensi wilayah;
- 2) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah;

- 3) Peningkatan destinasi dan daya tarik wisata;
- 4) Masih terbatasnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul dan terjangkau;
- 5) Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- 6) Masih terbatasnya jangkauan dan jaminan pelayanan kesehatan;
- 7) Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sarana prasarana kesehatan;
- 8) Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan angkatan kerja;
- 9) Peningkatan infrastruktur transportasi;
- 10) Masih terbatasnya akses air minum aman;
- 11) Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman;
- 12) Pemerataan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 13) Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;
- 14) Peningkatan tata kelola pemerintahan,

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan periode pembangunan lima tahunan keempat dalam rangka pencapaian visi daerah RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yakni **“Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing”**, dengan misi pembangunan daerah yakni:

- (1) Mewujudkan daya saing daerah;
- (2) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- (3) Mewujudkan manusia dan masyarakat bermoral dan berbudaya;
- (4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan visi dan misi jangka panjang tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke empat/terakhir yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah;
- (2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
- (3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
- (4) Meningkatnya kualitas SDM;
- (5) Menurunnya persentase pengangguran terbuka;
- (6) Tersedianya Infrastruktur transportasi yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi;
- (7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi wilayah;
- (8) Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut dan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi serta memperhatikan kondisi faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	
(1)		(2)		(3)	
1	Terwujudnya daya saing daerah	1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.1.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
				1.1.2	Kontribusi sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB
				1.1.3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
				1.1.4	Pertumbuhan PDRB
				1.1.5	Laju Inflasi Daerah
				1.1.6	Jumlah investor tingkat nasional (PMA dan PMDN)
				1.1.7	Indeks Desa Membangun (IDM)
		1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.2.1	Rata-rata lama sekolah
				1.2.2	Angka Harapan lama sekolah
				1.2.3	Angka melek huruf
				1.2.4	Angka harapan hidup
				1.2.5	Angka kesakitan
				1.2.6	Tingkat pengangguran terbuka (%)
				1.2.7	Angka Drop Out (%)
				1.2.8	Rasio lulusan S1, S2, S3
		1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.3.1	Tingkat kemantapan jalan (%)
				1.3.2	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)
				1.3.3	Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)
				1.3.4	Persentase jaringan irigasi
				1.3.5	Akses air minum aman (%)
				1.3.6	Akses sanitasi aman dan layak (%)
1.3.7	Cakupan pelayanan publik berbasis aplikasi				
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	2.1.1	Indeks Gini
				2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		2.2.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
		3	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang berkualitas	3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat
3.1.2	APK SD/MI/Paket A				
3.1.3	APK SMP/MTs/Paket B				
3.1.4	APM PAUD/TK				

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	
(1)		(2)		(3)	
				3.1.5	APM SD/MI/Paket A
				3.1.6	APM SMP/ MTs/Paket B
				3.1.7	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)
				3.1.8	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)
		3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Indeks Keluarga Sehat (<i>point</i>)
				3.2.2	Angka Kematian Ibu (AKI)
				3.2.3	Angka Kematian Bayi (AKB)
				3.2.4	Prevalensi Stunting (%)
		3.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3.3.1	Persentase PMKS (%)
				3.3.2	Persentase Penduduk Miskin (%)
		3.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.4.1	Indeks Pembangunan Gender
				3.4.2	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan
				3.4.3	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak
		3.5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.5.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)
				3.5.2	Persentase wirausaha muda
4	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)
				4.1.2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)
				4.1.3	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)
				4.1.4	Opini BPK (<i>Opini</i>)
				4.1.5	Persentase tindaklanjut LHP (%)
				4.1.6	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu (%)
				4.1.7	Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)
				4.1.8	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)
				4.1.9	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
				4.1.10	Cakupan Penanganan Konflik Sosial
				4.1.11	Cakupan Penanganan Kriminalitas
				4.1.12	Cakupan penanganan bencana
				4.1.13	Jumlah hasil kelitbangan
				4.1.14	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.
				4.1.15	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan di atas, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan bagi *Stakeholders* dalam partisipasi pembangunan daerah.

Tabel 2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN (Tahun)				
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 Terwujudnya Daya Saing Daerah						
1.1 Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.1.1	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Pengolahan hasil dan Pasca Panen	
	1.1.2	Meningkatkan kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Penguatan kelembagaan industri	Peningkatan kualitas produksi	Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	
	1.1.3	Pengembangan agroindustri				
	1.1.4	Meningkatkan daya tarik pariwisata	Penguatan kapasitas pelaku pariwisata Peningkatan atraksi pariwisata	Peningkatan aksesibilitas dan amenitas	Promosi dan pemasaran pariwisata	
	1.1.5	Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi Perluasan sistem dan jaringan pemasaran			
	1.1.6	Pengawasan harga bahan pokok	Pengendalian bongkar muat barang			
	1.1.7	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Pemantapan OSS	Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Promosi Potensi Investasi Daerah	

TUJUAN / SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN (Tahun)			
				2023	2024	2025	2026
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		1.1.8	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa			
1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.2.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata pada semua tingkat pendidikan	Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi			
		1.2.2	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan dan pendidikan non formal yang bermutu	Penyelenggaraan pendidikan non formal			
				Penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan di desa			
				Mengembangkan layanan perpustakaan daerah			
		1.2.3	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Meningkatkan Jaminan Layanan Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)			
		1.2.4	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif				
1.2.5	Peningkatan Pelatihan Keterampilan	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	Membangun BLK yang memenuhi standar	Optimalisasi BLK			
1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.3.1	Meningkatkan kualitas jalan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibukota kabupaten		Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah	
		1.3.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut			
		1.3.3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat	Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat			
		1.3.4	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Pemetaan Daerah Irigasi	Pembangunan dan pemeliharaan Daerah Irigasi		
		1.3.5	Meningkatkan akses air minum masyarakat	SID penyediaan Air Bersih	Pembangunan dan peningkatan jaringan air minum		
		1.3.6	Meningkatkan akses sanitasi aman dan layak bagi masyarakat	Penataan regulasi dan kelembagaan pengelolaan IPLT		Pengadaan Sarana dan Prasarana sanitasi	
Peningkatan sistem pengolahan sampah rumah tangga							

TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN (Tahun)				
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	1.3.7	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung	Pelatihan peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian			
2 Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Eerkeadilan dan Berkelanjutan						
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	2.1.1	Peningkatan Pembangunan dengan pendekatan Tematik	Peningkatan pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat		
		2.1.2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengadaan lahan untuk TPA di Pulau Adonara		
				Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah regional		
				Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
3 Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas						
3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Fasilitas Pendidikan	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu		
				Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar pendidikan nasional		
				Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK)		
				Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas		
		3.2.2	Peningkatan Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat		
Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata						
3.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3.3.1	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial		
		3.3.2	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat			
3.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.4.1	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak		
				Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak		

TUJUAN / SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN (Tahun)			
				2023	2024	2025	2026
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
3.5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.5.1	Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Pemuda	Revitalisasi Organisasi Kepemudaan			
				Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda			
				Menyediakan Sarpras olahraga yang memenuhi standar dan menciptakan atlit berprestasi			
4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah			
				Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.			
				Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan.			
		4.1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas ASN	Penataan sistem administrasi ASN			
				Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur			
		4.1.3	Optimalisasi Potensi PAD	Pendataan dan penetapan obyek PAD	Implementasi digitalisasi sistem pungutan PAD		
		4.1.4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Penertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatkan pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah		
		4.1.5	Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerinah daerah.	Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.			
		4.1.6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.			
		4.1.7	Meningkatkan keterlibatan OPD dalam website pemda	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Website Pemerintah Daerah			
4.1.8	Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan	Membangun sistem perencanaan dan peganggaran terpadu					
4.1.9	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu					
4.1.10	Peningkatan kesadaran hukum	Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM					
		Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.					

TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN (Tahun)				
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	4.1.11	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.	Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.			
	4.1.12	Penguatan fungsi Litbang Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan			
	4.1.13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa			
			Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa			

5. PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah dirumuskan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, Pemerintah menyusun program-program prioritas dengan indikator kinerja program sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut;

Tabel 3
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	PD PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Daya Saing Daerah			
1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi			
	1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani minimal tingkat madya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan & Dinas Perkebunan dan Peternakan
	1.1.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian	
	1.1.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian	
	1.1.4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana	Dinas Perikanan
	1.1.5	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum	Dinas Koperasi dan UKM
	1.1.6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	PD PENANGGUNG JAWAB		
(1)	(2)	(3)	(4)		
	1.1.7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan	Dinas Perikanan	
	1.1.8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	1.1.9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata		
	1.1.10	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata		
	1.1.11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan dan Industri	
	1.1.12	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi		
	1.1.13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang	Dinas Perdagangan dan Industri	
	1.1.14	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	1.1.15	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi pelayanan penanaman modal		
	1.1.16	Program Promosi Penanaman Modal	Persentasi promosi penanaman modal		
	1.1.17	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan lembaga pemberdayaan Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	1.2	1.2.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)		
Angka Drop Out (%)					
Penurunan Buta Huruf (%)					
1.2.2		Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan layanan perpustakaan(%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.2.3		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)	Dinas Kesehatan	
			Cakupan PHBS (%)	Dinas Kesehatan	
	Penanganan penyakit menular (%)		Dinas Kesehatan		
		Kasus penyakit tidak menular (%)	Dinas Kesehatan		

TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
		Presentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	Dinas Kesehatan
	1.2.4 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah sarana prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standard	Dinas Tenaga Kerja
	1.2.5 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa	Bagian Kesra Setda
1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.3.1 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.3.2 Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		1.3.3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		1.3.4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.3.5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.3.6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.3.7 Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		1.3.8 Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	<i>Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan</i>		
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	2.1.1 Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2.1.2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2.1.3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.2.2 Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.2.3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	PD PENANGGUNG JAWAB		
(1)	(2)	(3)	(4)		
3	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas				
3.1	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan Masyarakat	3.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik(%)	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	
				Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	
				Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	
3.1.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga		
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	Dinas Kesehatan
				Angka Gizi Buruk (%)	Dinas Kesehatan
				Cakupan Desa/kelurahan STBM (%) (Desa/Kel)	Dinas Kesehatan
				Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Miskin (%)	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
				Cakupan penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan (%)	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
				Cakupan Pemulihan Kesehatan	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
				Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
				Persentase sarana/prasarana RS dalam kondisi baik (%)	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
				Cakupan Peningkatan mutu pelayanan klinis RS (%)	
				Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pertolongan/pelayanan ibu bersalin sesuai standar	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standard	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	

TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	PD PENANGGUNG JAWAB				
(1)	(2)	(3)	(4)				
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia pendidikan Dasar sesuai standard					
		Cakupan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif sesuai standar					
		Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid 19					
		Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)		Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka			
		3.2.2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	Dinas Kesehatan		
3.2.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	Dinas Kesehatan				
3.2.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	Dinas Kesehatan dan RSU				
	3.2.5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	DP2KBP3A			
			Cakupan Akseptor Baru (%)				
3.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3.3.1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	Dinas Sosial		
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)			
	3.3.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	Dinas Sosial			
3.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.4.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	DP2KBP3A		
				3.4.2		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)
				3.4.3		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)
3.5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.5.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga		
				Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri			
	3.5.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar				

TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
4.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerapan SPM sesuai standar.	Setda (Bagian Pemerintahan Umum)
		Cakupan Penerapan SOP sesuai standar	Setda (Bagian Organisasi)
	4.1.2 Program pendaftaran penduduk.	Rasio penduduk ber-KTP, (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber-KK (%)	
	4.1.3 Program pencatatan sipil	Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran (%)	Dinas Penanaman Modal
		Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	
	4.1.4 Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Pelayanan Perijinan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	4.1.5 Program Kepegawaian Daerah.	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan	Badan Pendapatan Daerah
	4.1.6 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan	
	4.1.7 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4.1.8 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (BOS)	
	4.1.9 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset	Inspektorat Daerah
	4.1.10 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	
	4.1.11 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4.1.12 Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah OPD yang menjadi sub domain website Pemda.	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4.1.13 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Bappelitbangda
4.1.14 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentasi program kegiatan yang dilaksanakan		
4.1.15 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4.1.16 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum,	Persentase kasus kriminal yang ditangani (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	

TUJUAN / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	4.1.17 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Cakupan Penanganan Bencana	
		Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
	4.1.18 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan	Bappelitbangda
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan	
	4.1.19 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Rumusan Program Perangkat Daerah terdiri dari program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam pelaksanaan bidang urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak luas pada bidang kehidupan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah meliputi program pembangunan pada urusan wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026, dirumuskan seluruh program Renstra PD beserta indikator kinerja program sebagai berikut;

Tabel 4
Rancangan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)			(2)	(3)	(4)
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	Semua PD
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APM dan APK PAUD (%) APM dan APK Wajib Belajar Sembilan Tahun (%) Penurunan Buta Huruf (%) Angka DO (%) Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%) Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%) Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Angka Kelulusan SMP/MTS (%) Persentase SD terakreditasi minimal B (%) Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	- Dinas PKO - Sekolah Negeri
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kurikulum Muatan lokal yang dikembangkan	Dinas PKO
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Perizinan yang dikendalikan (Dokumen)	
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%) Cakupan PHBS (%) Penanganan penyakit menular (%) Kasus penyakit tidak menular (%) Presentase puskesmas yang terakreditasi utama (%) Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	- Dinas Kesehatan - RSUD dr Hendrikus Fernandez Lrtka

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)		
				Angka Gizi Buruk (%)	
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)	
				Cakupan PHBS (%)	
				Cakupan Desa/kelurahan STBM (%) (Desa/Kel)	
				Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)	
				Cakupan penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan (%)	
				Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	
				Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	
				Persentase sarana/prasarana RS dalam kondisi baik (%)	
				Cakupan Peningkatan mutu pelayanan klinis RS (%)	
				Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standard (%)	
				Cakupan Pertolongan/pelayanan ibu bersalin sesuai standar (%)	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standard (%)	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia pendidikan Dasar sesuai standard (%)	
				Cakupan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif sesuai standar (%)	
				Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar (%)	
				Cakupan Pelayanan Vaksin Covid 19 (%)	
				Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	Dinas Kesehatan & RSUD Hendikus Fernandez Lrika
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	Dinas Kesehatan & RSUD Hendikus Fernandez Lrika
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	Dinas Kesehatan
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan)	Dinas PUPR
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum (%)	

URUSAN	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana dan prasarana Sampah (%)	
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang	
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni	DPKPP
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU	DPKPP
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Kriminal yang ditangani (%) Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana Persentase Cakupan Penanganan Bencana Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana (%)	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%) Persentase Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	Dimas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%) Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%) Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola (%)	

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja (Dokumen)	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%) Jumlah sarana prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standard (Unit)	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga kerja (%)	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perkara perselisihan yang ditangani(%)	
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peringkat Pusat pembelajaran keluarga(PUSPAGA) yang berhasil di capai (Peringkat)	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data gender dan anak (%)	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%) Persentase Desa/Kelurahan layak Anak(%)	
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi, Protein, Lemak (Kkal/ Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Energi, Protein, Lemak (Kkal/Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari; Gram/Kap/Hari)	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan Energi, Protein, Lemak (Kkal/Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari; Gram/Kap/Hari) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)		(3)	(4)	
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah pemma yang difasilitasi (%)	
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)	
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%) Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (dokumen) Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun (dokumen)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan daerah yang dikonservasi	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati(%) Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota (ha)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (b3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%) Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD (dokumen)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Dokumen) Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapastan dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	Dinas Lingkungan Hidup

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)</i>	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah dokumen Pengaduan lingkungan hidup (dokumen)</i> <i>Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten / kota yang ditindaklanjuti / ditangani (dokumen)</i> <i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan saksni administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan (dokumen)</i>	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	<i>Persentase sampah perkotaan yang ditangani (%)</i>	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	<i>Rasio penduduk ber-KTP, (%)</i> <i>Rasio penduduk ber-KK (%)</i>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	<i>Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran (%)</i> <i>Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)</i>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Administrasi Kependudukan: KK, KTP, Akta)</i>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		Urusan Penterintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	13	02	Program Penataan Desa	<i>Cakupan sarana dan prasarana desa</i> <i>Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa (Desa)</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Persentase kelengkapan administrasi desa</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	<i>- Jumlah dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Dokumen)</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)</i>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	<i>Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)</i> <i>Cakupan Akseptor Baru (%)</i>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)		
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase remaja perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%) Persentase balita yang mengikuti KOBER dan PAUD (%)	
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik	
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi informatika	
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif (%)	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi) Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (Unit Usaha)	
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi) Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (Orang)	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi) Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM / LKM (UMKM) Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Unit Usaha)	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi (Unit Usaha)	

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah PMDN/ PMA (Kali) Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota (Dokumen)	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu satu Pintu
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan penanaman modal	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/ PMA (Kali) Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)	
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal	
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif(%)	
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah keragaman budaya (Ragam Budaya)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (Obyek)	
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka (Orang)	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara secara berkala Jumlah aksesibilitas/ ketersediaan layanan informasi kearsipan	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (Box)	

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)		(3)	(4)	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana	Dinas Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	
3	25	05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dokumen)	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan	
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan & Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani minimal tingkat madya	
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang	
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi	
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian	Dinas Perdagangan & Perindustrian

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)			(2)	(3)	(4)
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	Dinas Tenaga Kerja
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Presentase Transmigran pada UPT yang diberdayakan (%)	
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Presentasi Unit Pemukiman Transmigrasi(UPT) yang dikembangkan (%)	
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
4	01		Sekretariat Daerah		
4	01	01	Program Administrasi Umum		Sekretariat Daerah
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kerja sama yang dijalin (Perguruan Tinggi) Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%) Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%) Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%) Jumlah produk hukum yang ditetapkan (Produk Hukum) Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan Pemerintah (Kasus) Jumlah Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM (Jumlah Penyuluhan)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat, Protokol)
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian Perekonomian(%) Kapabilitas Penyedia Jasa yang Memenuhi Standar (%) Jumlah Paket yang dilelang melalui LPSE (Paket) Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi Bag. SDA (%)	Sekretariat Daerah (Bagian SDA, Perekonomian, dan Pengadaan Barang dan Jasa)
4	02		Sekretariat DPRD		
4	02	01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)	Sekretariat DPRD
5			Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan		
5	01		Perencanaan		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi (dokumen)	Bappelitbangda

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)		
				Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)	
				Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	
5	01	03	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi, SDA dan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	
				Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Resntra/Renja (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)	
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi, SDA dan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	
5	02		Keuangan		
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	BKAD & Bapenda
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	BKAD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Bapenda
5	03		Kepegawaian		
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan.(%)	BKPSDMD
5	04		Pendidikan dan Pelatihan		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan.(%)	BKPSDMD
5	05		Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	Bappelitbangda
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		Inspektorat Daerah		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan(%)	Inspektorat

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (rekomendasi)</i> <i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)</i> <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (kegiatan)</i>	
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		Kecamatan		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Persentase Peningkatan Koordinasi Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)</i>	Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga kemasyarakatan/Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan (lembaga/orang)</i> <i>Jumlah Sarana Prcsana Kelurahan yang Tebangun (unit)</i> <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Menaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)</i> <i>Jumlah Dokumen Penanganan Covid 19 Di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)</i>	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Persentase Konflik yang ditangani (%)</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	<i>Perentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)</i>	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Laimiya (orang; kali)</i>	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<i>Persentase penyelesaian Masalah aktual (%)</i>	